

Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Pembinaan Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Natuna

Rifi Hamdani Sitohang^{1*}, Rina Perwita Sari²

¹ Sespimma Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Indonesia, 43091

² Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Indonesia, 40391

Email Address : tohank4242@gmail.com¹, rinacyien@gmail.com²

ABSTRAK: Peran Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak pelaksanaan fungsi preemtif dan preventif Polri di tingkat desa dan kelurahan. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam hal keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah binaan, rendahnya dukungan sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Methods* dengan metode kajian teoretis konseptual yang diintegrasikan dengan metode angket atau wawancara kepada personel Bhabinkamtibmas di seluruh Polsek jajaran. Teknik pengumpulan data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner, penggunaan statistik deskriptif serta pemetaan EFAS-IFAS, sedangkan data kualitatif melalui wawancara, observasi, dan FGD, yang kemudian disatukan untuk tahap interpretasi lalu dianalisis dengan menggunakan teknik SFAS. Simpulan dari penelitian ini mencakup kondisi kesiapan SDM, kondisi ketersediaan anggaran, kondisi faktual sarana prasarana, dan kondisi faktual metode yang dijalankan. Dari simpulan yang diperoleh, disampaikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan.

Kata kunci: *Bhabinkamtibmas, Pembinaan Masyarakat, Harkamtibmas Polres Natuna, EFAS/IFAS-SFAS*

ABSTRACT: The role of Bhabinkamtibmas is the spearhead of the implementation of the preemptive and preventive functions of the Indonesian National Police at the village and sub-district levels. However, the less than optimal implementation of Bhabinkamtibmas duties is influenced by factors such as limited personnel, the vast area of responsibility, low support for facilities and infrastructure, and less than optimal coordination with local government officials and community leaders. This study aims to analyze efforts to optimize the role of Bhabinkamtibmas in carrying out community development in the jurisdiction of the Natuna Police in order to create a safe, orderly and conducive situation of security and public order as a tangible form of the presence of the Indonesian National Police in the community. This study uses a Mixed Methods approach with a conceptual theoretical study method integrated with a questionnaire or interview method with Bhabinkamtibmas personnel in all Polsek ranks. Quantitative data collection techniques were obtained through the distribution of questionnaires, the use of descriptive statistics and EFAS-IFAS mapping, while qualitative data through interviews, observations and FGDs which were then combined for the interpretation stage and analyzed using the SFAS technique. The conclusions of this study cover the state of human resource readiness, budget availability, the actual state of infrastructure, and the actual state of the methods used. These conclusions lead to suggestions and recommendations to management.

Keywords: *Bhabinkamtibmas, community development, Polres Natuna, Harkamtibmas, EFAS/IFAS-SFAS*



1. Pendahuluan

Konstitusi telah menempatkan tugas Polri secara strategis yakni “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002). Oleh karena itu, peran Polri dalam fungsi pemeliharaan kamtibmas harus dioptimalkan, sejalan dengan perkembangan dinamika sosial, politik, dan keamanan yang semakin kompleks.

Semakin kompleksnya tugas kepolisian menuntut perbaikan kinerja serta dukungan institusional yang tepat (Hamdani Sitohang *et al.*, 2025). Di sisi lain, dalam konteks wilayah hukum Polres Natuna, peran Bhabinkamtibmas masih menghadapi tantangan yang multidimensional. Keterbatasan personel dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam menyebabkan kapasitas pemeliharaan harkamtibmas belum sepenuhnya ideal. Padahal, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penting bagi organisasi (Nardo *et al.*, 2025), termasuk di kepolisian sebagai institusi pelayan masyarakat. SDM yang kompeten juga dapat mendukung efisiensi pekerjaan seseorang (Adma Gumilang *et al.*, 2024)

Sementara itu, dalam hal kesiapan SDM Bhabinkamtibmas hanya lima anggota yang mampu menyelesaikan pendidikan umum hingga tahap S1, Selanjutnya Dikbang yang sudah ditempuh hanya 22 dari total 59 anggota. Kondisi ini diperberat oleh luasnya cakupan wilayah kepulauan, dan hanya dibawah oleh lima Polsek secara keseluruhan, sehingga rasio jumlah anggota Bhabinkamtibmas terhadap warga binaan tidak sebanding dan berdampak pada intensitas kehadiran di masyarakat.

Di sisi lain, dukungan anggaran operasional yang belum memadai khususnya untuk mobilitas, penyediaan sarana kontak, serta kebutuhan lapangan lainnya menjadi

faktor penghambat yang cukup signifikan. Keterbatasan anggaran ini berimplikasi pada berkurangnya frekuensi sambang, menurunnya kualitas interaksi, dan semakin terbatasnya mekanisme umpan balik pembinaan yang seharusnya terjalin secara konsisten antara aparat dengan masyarakat. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kinerja optimal, di mana kendaraan dinas dan alat komunikasi yang menjadi instrumen vital bagi mobilitas dan deteksi dini masih memerlukan perhatian dari aspek ketersediaan maupun peremajaan.

Pada akhirnya, meskipun kerangka normatif melalui Perkap Nomor 7 Tahun 2021 maupun SOP Bhabinkamtibmas telah memberikan pedoman yang jelas, tetapi implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Masih terdapat kecenderungan kegiatan berjalan formalitas dan administratif, sehingga esensi pemecahan masalah harkamtibmas belum optimal tercapai.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa hambatan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek kelembagaan dan strategi implementasi. Apabila tidak segera diatasi, dampak yang timbul dapat berupa meningkatnya risiko gangguan kamtibmas, bertambahnya beban penanganan kasus karena masalah sosial tidak selesai, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan peningkatan kapasitas personel, penguatan dukungan anggaran, pemeliharaan sarana prasarana, dan konsistensi metode pembinaan agar peran Bhabinkamtibmas benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan harkamtibmas di wilayah hukum Polres Natuna.

Penyusunan instrumen strategis dilakukan dalam kerangka manajemen strategis. Menurut Wheelen dan Hunger (2012, dikutip dalam Edison & Komariyah, 2023), manajemen

strategis mencakup empat komponen pokok. Tahap pertama adalah *environmental scanning*, yaitu kegiatan menelaah kondisi internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya, organisasi menyusun *strategy formulation* sebagai upaya merancang arah dan langkah strategis. Setelah perumusan, strategi tersebut dijalankan melalui *strategy implementation*. Tahap terakhir adalah *evaluation and control*, yaitu proses menilai pelaksanaan strategi sekaligus melakukan pengendalian agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, penyusunan instrumen strategis termasuk dalam proses *strategy formulation*.

Dalam proses penyusunan strategi, analisis lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis EFAS dan IFAS. Riyanto (2018) menguraikan bahwa analisis IFAS dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan internal, sedangkan analisis EFAS digunakan untuk memetakan peluang dan ancaman eksternal yang dapat berpengaruh terhadap organisasi.

Penelitian terdahulu telah membuktikan peran penting analisis lingkungan dalam konteks institusi kepilisan. Hasil analisis Ekici *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *community policing* (CP) berdampak positif pada indikator tertentu (kriminalitas/*fear*), meskipun hasilnya masih beragam lintas konteks dan pengukuran. Selanjutnya, dalam penelitian terkait *Bhabinkamtibmas*, Sumiati *et al.* (2025) menunjukkan perlunya pengukuran kuantitatif kinerja & desain intervensi berbasis risiko. Selain itu, masih ditemukan berbagai hambatan: terbatasnya sarpras & SDM, serta beban wilayah yang luas dalam pelaksanaan *Bhabinkamtibmas*, yang menunjukkan bahwa pembinaan belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam

melakukan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna agar harkamtibmas dapat terwujud ?” Atas dasar hal itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menilai tingkat kesiapan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna.
2. Mengkaji ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas di Polres Natuna.
3. Menganalisis sarana dan prasarana yang dimanfaatkan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna.
4. Mengevaluasi metode yang diterapkan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pembinaan masyarakat di Polres Natuna.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi Polri, khususnya pada tingkat Polres dalam melakukan pembinaan masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pemeliharaan kamtibmas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Methods* yaitu penelitian campuran yang mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu rancangan riset (Tashakkori dan Creswell, 2007).

2.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan prosedur sistematis melalui tahap persiapan dan perencanaan, pengumpulan data, analisis deskriptif kualitatif dengan matriks IFAS dan EFAS, serta interpretasi hasil untuk menilai dan merumuskan rekomendasi strategis terkait peran Bhabinkamtibmas dalam pembinaan masyarakat guna mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Natuna.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumentasi, dengan menelaah berbagai sumber tertulis antaranya regulasi dan kebijakan lokal, laporan kegiatan, notulen rapat, serta dokumentasi visual (foto dan laporan kegiatan) yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Polres Natuna.
2. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen strategis Polri antaranya Rencana Strategis (Renstra) Bhabinkamtibmas, laporan evaluasi kinerja, catatan pelatihan dan pengembangan SDM, hasil penelitian akademis, serta bentuk kerja sama lintas lembaga dan masyarakat.

2.3 Analisis Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner, penggunaan statistik deskriptif, serta pemetaan EFAS-IFAS, sedangkan data kualitatif dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan FGD. Analisis kedua jenis data tersebut dilakukan secara terpisah, kemudian hasilnya disatukan pada tahap interpretasi. Metode analisis utama yang digunakan adalah SFAS melalui tahapan:

1. Menginventarisasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap peran Bhabinkamtibmas.
2. Memberi bobot dan peringkat terhadap faktor-faktor tersebut menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).
3. Menghitung skor serta memetakan strategi organisasi dalam *Strategic Position Map* untuk merumuskan strategi kebijakan operasional yang mendukung optimalisasi peran Bhabinkamtibmas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kesiapan sumber daya manusia Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna

Potret kesiapan sumber daya manusia Satbinmas Polres Natuna ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data SDM Bhabinkamtibmas Polres Natuna Tahun 2024

No	Polsek	Jml desa	Jml Bhabin	Dikum & pelatihan / dikbangpes		
				SMA	S1	DIKBANG
1	Bunguran Timur	22	20	17	3	8
2	Bunguran Barat	23	20	19	1	5
3	Serasan	14	12	11	1	7
4	Midai	8	4	4	-	2
5	Pulau Laut	6	3	3	-	-
Jumlah		73	59	54	5	22

Sumber: Lapsat Satbinmas Polres Natuna, diakses Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 1, terungkap bahwa kesiapan SDM Bhabinkamtibmas hanya 5 anggota yang mampu menyelesaikan pendidikan umum hingga tahap S1. Selanjutnya Dikbang yang sudah ditempuh hanya 22 dari total 59 anggota. Kondisi yang belum ideal ini diperjelas dengan luas wilayah Kabupaten Natuna yang memiliki luas daratan 1.978,29 km² dan hanya dibawah oleh 5 Polsek secara keseluruhan. Jika di hitung rata-rata 1 Bhabin mencakup luas wilayah 33,5 km². Kondisi tersebut menjadi kendala dasar namun tiada henti karena wilayah geografis Kabupaten Natuna, Selain itu, juga terdapat persoalan yang masih belum optimal dari kesiapan SDM Bhabinkamtibmas Polres Natuna dari aspek kuantitas dan kualitas anggota Bhabinkamtibmas. Hal ini tidak kalah penting dalam melakukan pembinaan masyarakat. Jika hadir namun hanya sekedar menggugurkan kewajiban persoalan, tentu efektivitas pembinaan tidak akan berjalan.

3.2 Ketersediaan anggaran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna

Pembinaan masyarakat pada konteks kewilayahan kepulauan seperti Natuna menuntut

dukungan anggaran yang realistis, adaptif, dan berkelanjutan. Karakteristik geografis (jarak antarpulau, cuaca laut, akses transportasi), sebaran penduduk, serta kebutuhan kehadiran Bhabinkamtibmas secara intensif di tingkat desa/kelurahan memerlukan biaya operasional di atas rata-rata wilayah daratan.

Ketika anggaran tidak memadai atau tidak tepat sasaran, maka siklus pembinaan mulai dari sambang/DDS, pemetaan kerawanan, intervensi *problem solving*, hingga *after action review* cenderung tereduksi menjadi formalitas administratif. Pada akhirnya, keterbatasan anggaran bukan sekadar isu administrasi, melainkan berdampak langsung pada kecepatan respons, kualitas interaksi humanis, daya jangkau layanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Data anggaran yang dikelola Satbinmas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Anggaran Satbinmas Polres Natuna Tahun 2024

No	Uraian Giat	PAGU		
		2022	2023	2024
1	Program Modernisasi Almatas dan Sarana Prasarana Polri	2.765.000	2.810.000	2.830.000
2	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	7.835.000	7.915.000	8.359.000
3	Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas	34.718.000	35.643.000	36.618.000
4	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengamanan Swakarsa	34.326.000	34.800.000	34.776.000
5	Pemberdayaan Kemitraan dg Lembaga Pend, Tkh Masy, Instansi	44.654.000	45.352.000	47.352.000
6	Asistensi Kelompok Sadar Kamtibmas	31.018.000	32.025.000	33.048.000
Jumlah		155.316.000	158.545.000	162.983.000

Sumber: Lapsat Satbinmas Polres Natuna, diakses Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2, terungkap bahwa anggaran Satbinmas mengalami kenaikan yang tidak signifikan setiap tahunnya. Hal ini berbanding terbalik dengan dinamika di lapangan yang membutuhkan kompleksitas dalam pembinaan masyarakat dari sisi luas wilayah serta cakupan masing-masing Bhabinkamtibmas.

3.3 Sarana dan prasarana yang dimiliki Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna

Pembinaan masyarakat di wilayah kepulauan Natuna menuntut sarana dan prasarana (sarpras) yang andal, aman, dan siap pakai. Jarak antarpulau, kondisi cuaca laut, keterbatasan jaringan komunikasi, serta sebaran pemukiman menjadikan kehadiran fisik Bhabinkamtibmas sangat bergantung pada ketersediaan kendaraan, alat keselamatan, perangkat komunikasi, dan instrumen kerja dokumentasi data. Ketika sarpras tidak memadai atau tidak terpelihara, ritme sambang/DDS melemah, *response time* melambat, kualitas interaksi menurun, dan *early warning* terhadap potensi gangguan kamtibmas terlambat. Dengan kata lain, sarpras bukan pelengkap, melainkan tulang punggung layanan yang humanis, tepat, dan konsisten. Hal itu dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Data Sarpras Satbinmas Polres Natuna

No	Kegiatan	Jml	Konidisi			Ket
			B	RR	RB	
1	HT	4	2	1	1	
2	Komputer	1	1	-	-	
3	Printer	1	-	1	-	
4	Proyektor	1	1	-	-	
5	Toa/Megaphone	3	2	1	-	
6	Ranmor R2	3	2	1	-	
7	Mobil Penyuluhan	1	-	1	-	
Total		14	8	5	1	

Sumber: Lapsat Satbinmas Polres Natuna, diakses Tahun 2024

Data pada tabel 3 mengungkapkan masih terdapat kondisi sarpras rusak berat. Hal tersebut dapat menghambat jalannya kelancaran dalam pembinaan saat di lapangan, terlepas semua kondisi sarparas yang ada, ketersediaan masih belum mampu mencakup semua kebutuhan yang mampu menunjang dalam pembinaan agar optimal.

3.4 Metode yang di jalankan Bhabinkamtibmas dalam melakukan pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna

Metode kerja Bhabinkamtibmas menyinergikan empat unsur utama manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam setiap tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah perencanaan, yang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Data Perencanaan Satbinmas
 Polres Natuna

No	Kegiatan	2022	2023	2024
1	Rapat Koordinasi	12	14	12
2	FGD	17	12	16
3	Dialog Interaktif	23	20	19
Jumlah		52	46	47

Sumber: Satbinmas Polres Natuna, Tahun 2025 (data diolah penulis)

Data pada tabel 4 menunjukkan sudah terdapat upaya dalam perencanaan sebagai langkah dalam mengantisipasi ataupun mengatasi baik konflik sosial maupun hukum, namun pelaksanaannya masih terbilang belum konsisten terlihat dari penurunan giat yang di lakukan serta masih belum berdampak signifikan terhadap peran Bhabinkamtibmas.

Tahap kedua adalah pengorganisasian dengan tiga pilar dan jejaring lokal secara fungsional, yang disajikan pada Tabel 5. Data menunjukkan sudah terdapat database masing-masing kecamatan yang mewakili dari tokoh masyarakat guna mendukung peran Bhabinkamtibmas, namun hal tersebut masih belum ideal.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan, sebagai titik di mana rencana diuji oleh medan. Kualitas sambang, kecepatan respon, ketepatan binluh, dan efektivitas pemecahan masalah menjadi ukuran nyata. Di kepulauan, pelaksanaan menuntut disiplin rute, ketangguhan cuaca, komunikasi yang humanis, serta dokumentasi yang rapi agar *feedback loop* berjalan. Data disajikan pada Tabel 6. Data menunjukkan bahwa masih terdapat penurunan pelaksanaan giat bhabinkamtibmas di beberapa giat, dari tahun 2022 secara keseluruhan sama dengan tahun 2024, persoalan tersebut menambah aspek pelaksanaan masih belum ideal.

Tabel 5. Data Tokoh Masyarakat di Wilayah Hukum
 Polres Natuna

No	Kecamatan	Tokoh Masyarakat		
		2022	2023	2024
1	Bunguran Barat	5	4	5
2	Bunguran Batubi	5	4	4
3	Bunguran Selatan	4	3	5
4	Bunguran Tengah	3	2	3
5	Bunguran Timur	7	6	4
6	Bunguran Timur Laut	7	6	6
7	Bunguran Utara	6	5	6
8	Midai	3	2	2
9	Pulai Tiga	6	5	4
10	Pulau Laut	3	2	2
11	Pulau Panjang	2	1	2
12	Pulau Seluan	1	1	2
13	Pulau Tiga Barat	4	3	2
14	Serasan	7	6	7
15	Serasan Timur	4	3	3
16	Suak Midai	3	2	3
17	Subi	8	7	6
Jumlah		78	62	66

Sumber: Satbinmas Polres Natuna, Tahun 2025 (data diolah penulis)

Tabel 6. Data Pelaksanaan Giat Satbinmas Polres Natuna

No	Kegiatan	2022	2023	2024
1	Binluh	21	20	20
2	Sosialisasi	18	19	18
3	Sambang	23	20	19
4	Patroli	17	21	22
Jumlah		79	80	79

Sumber: Satbinmas Polres Natuna, Tahun 2025 (data diolah penulis)

Tahap keempat adalah pengendalian. Dalam konteks Pulau Natuna, pengendalian yang efektif harus sederhana namun tegas: memantau *outcome*, mengelola risiko cuaca/medan, serta menjamin akuntabilitas layanan di mata warga.

Tabel 7. Data Pengendalian Giat Satbinmas
 Polres Natuna

NO	Kegiatan	2022	2023	2024
1	Monitoring	6	5	4
2	Manajemen Resiko	6	5	6
3	Analisis Evaluasi	8	7	6
Jumlah		20	17	16

Sumber: Satbinmas Polres Natuna, Tahun 2025 (data diolah penulis)

Data pengendalian giat Satbinmas masih menunjukkan penurunan setiap tahunnya yang mengakibatkan pada tahap akhir tidak bisa mendapat hasil yang optimal dalam metode yang dijalankan dalam pembinaan masyarakat.

3.5 Analisis Faktor Lingkungan Strategis Eksternal (EFAS) dan Internal (IFAS)

Berdasarkan hasil kajian di atas, diperoleh EFAS dan IFAS pada Tabel 8 dan 9.

Tabel 8. EFAS
 (External Factors Analysis Summary)

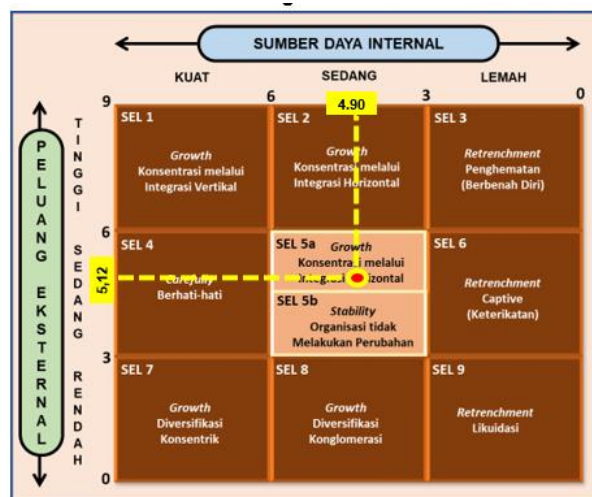
No	Key External Factors	Bobot	Rating	Skor
Opportunities				
1	Meningkatnya keterlibatan tokoh masyarakat	0.09	6	0.54
2	Adanya kerja lembaga pelatihan eksternal	0.10	7	0.70
3	Kemitraan lintas sektor pemerintah daerah	0.11	7	0.77
4	Kemajuan teknologi informasi	0.12	8	0.96
5	Adanya kerja dengan perguruan tinggi	0.08	6	0.48
	Jumlah	0.50		3.45
Threats				
1	Adanya pok masy menolak pendekatan preventif	0.08	3	0.24
2	Penyebaran informasi hoaks dan propaganda negatif	0.09	3	0.27
3	Kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat	0.12	4	0.48
4	Tindakan provokatif dari pihak tertentu	0.13	4	0.52
5	Keberagaman budaya dan bahasa lokal	0.08	2	0.16
	Jumlah	0.50		1.67
	Total	1.00		5.12

Tabel 9. IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

No	Key internal factors	Bobot	Rating	Skor
Strength				
1	Pembinaan mental, kepribadian, dan etika profesi	0.09	6	0.54
2	Adanya program pelatihan internal	0.10	7	0.70
3	Penerapan sistem reward and punishment	0.12	8	0.96
4	Sistem pembinaan SDM melalui Dikjur	0.10	7	0.70
5	Dukungan anggaran yang meningkat	0.09	6	0.54
	Jumlah	0.50		3.44
Weakness				
1	Rendahnya inisiatif sebagian anggota	0.08	2	0.16
2	Kurangnya keterampilan komunikasi	0.09	3	0.27
3	Masalah disiplin personel mengurangi efektivitas	0.11	3	0.33
4	Keterbatasan sarana dan prasarana	0.13	4	0.52
5	Kurangnya kompetensi teknis dalam komunikasi publik	0.09	2	0.18
	Jumlah	0.50		1.46
	Total	1.00		4.90

3.6 Formulasi Strategi

Dari analisis EFAS dan IFAS di atas, dapat ditentukan posisi organisasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Posisi Organisasi

Posisi strategi organisasi berada pada Kuadran/Sel 5a. Nilai peluang eksternal tercatat berada pada angka 5,12, sedangkan kapasitas internal berada pada angka 4,90. Kombinasi kedua nilai tersebut menggambarkan bahwa kondisi organisasi berada pada tingkat *moderate* atau berada pada situasi yang tidak terlalu kuat namun juga tidak dalam keadaan lemah.

3.7 Penentuan SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)

SFAS merupakan tahapan yang merangkum faktor-faktor strategis dengan cara menggabungkan temuan dari analisis lingkungan eksternal (EFAS) dan lingkungan internal (IFAS). Melalui SFAS, organisasi dapat merumuskan alternatif strategi untuk menyelesaikan permasalahan dengan berlandaskan hasil pembobotan, pemberian peringkat, serta perhitungan skor.

Tabel 10. SFAS (Strategic Factor Analysis Summary)

No	Faktor strategik kunci	Bobot	Rating	Skor	Jangka		
					Kadek	Kadang	Kajang
1	Penanganan tindakan provokatif dari pihak-pihak tertentu	0.07	4	0.28			
2	Penanggulangan keterbatasan sarana dan prasarana	0.09	4	0.36			
3	Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi	0.13	8	1.04			
4	Penanggulangan kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat	0.07	4	0.28			
5	Pemantapan penerapan sistem <i>reward and punishment</i>	0.14	8	1.12			
6	Pemanfaatan kemitraan lintas sektor	0.11	7	0.77			
7	Penanggulangan masalah disiplin personel	0.07	3	0.21			
8	Pemberdayaan adanya kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal	0.12	7	0.84			
9	Pemanfaatan adanya program pelatihan internal	0.10	7	0.70			
10	Pemantapan sistem pembinaan SDM yang terstruktur melalui Dikjur	0.11	7	0.77			
Total		1,00					

Dari hasil pengolahan SFAS, termasuk proses pembobotan dan pemeringkatan, diperoleh kategori strategi berdasarkan jangka waktunya. Penentuan kategori dilakukan melalui perhitungan rentang (*range*), yaitu selisih antara skor tertinggi dan terendah lalu dibagi menjadi tiga bagian. Dengan skor tertinggi 1,12 dan skor terendah 0,21, maka diperoleh rentang: $(1,12 - 0,21) = 0,91$, kemudian $0,91 : 3 = 0,30$ sebagai batas interval.

- Strategi Jangka Pendek ditentukan dari skor terendah ditambah interval, yaitu $0,21 + 0,30 = 0,51$.
- Strategi Jangka Panjang diperoleh dari skor tertinggi dikurangi interval, yakni $1,12 - 0,30 = 0,82$.
- Strategi Jangka Sedang berada pada rentang nilai di antara kategori jangka pendek dan panjang, yaitu 0,52 hingga 0,81.

3.8 Implementasi Strategi

Strategi pembinaan Bhabinkamtibmas dirancang secara bertahap dalam jangka pendek dengan fokus pada penguatan manajemen konflik dan deteksi dini potensi gesekan sosial, optimalisasi sarana prasarana pendukung, peningkatan kepercayaan publik melalui

pendekatan dialogis, serta penegakan disiplin dan supervisi kinerja untuk meningkatkan efektivitas pembinaan di tingkat desa/kelurahan. Pendekatan ini bertujuan memperbaiki respons awal, memperkuat kehadiran personel, dan memastikan kegiatan pembinaan berjalan lebih konsisten.

Pada jangka menengah, strategi diarahkan pada penguatan kemitraan lintas sektor, pelatihan internal, serta pengembangan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas preemtif dan preventif. Sementara itu, jangka panjang difokuskan pada digitalisasi pembinaan kamtibmas, penerapan sistem *reward and punishment*, serta kolaborasi dengan lembaga pelatihan eksternal untuk mendorong peningkatan profesionalitas, kualitas layanan, dan keberlanjutan pembinaan masyarakat.

3.9 Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko adalah rangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi, mengendalikan, atau mempertahankan tingkat risiko pada batas yang dapat diterima oleh organisasi.

R1: Pengurangan kemungkinan melalui

pelatihan komunikasi persuasif dan pengurangan dampak dengan pembentukan jalur deteksi dini.

R2: Pengurangan kemungkinan dengan pelatihan triwulan serta pengurangan dampak melalui sistem mentoring

R3: Pengurangan kemungkinan dengan peta sinyal wilayah serta pengurangan dampak dengan pelatihan penggunaan sistem

3.10 Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu dilaksanakan untuk mengamati perkembangan kondisi risiko serta mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi, sehingga strategi penanganannya tetap relevan dan efektif. Dengan rincian sebagai berikut :

R1: Menurunkan konflik desa serta respon cepat di lapangan

R2: Standar kompetensi tercapai serta pelaksanaan tugas lebih baik

R3: Perbaikan akses komunikasi serta Pemanfaatan sistem meningkat

4. Kesimpulan

Kondisi faktual menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas dalam pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Natuna masih belum optimal. Peningkatan kapasitas personel perlu dilakukan melalui sistem pembinaan SDM yang terstruktur dan berjenjang, termasuk pendidikan kejuruan, pengembangan spesialisasi, serta kerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal guna memperkuat kompetensi komunikasi publik, mediasi konflik, dan penyuluhan hukum. Di sisi lain, keterbatasan anggaran menuntut penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial agar kegiatan pembinaan dapat berjalan berkelanjutan melalui pendekatan kemitraan dan pelatihan internal yang efisien.

Selain itu, keterbatasan sarana prasarana dan metode pembinaan perlu diatasi melalui pemeliharaan dan penyesuaian sarpras berbasis karakteristik wilayah kepulauan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan, komunikasi, dan deteksi dini gangguan kamtibmas. Pemantapan metode pembinaan juga memerlukan penerapan sistem reward and punishment, penguatan keterampilan komunikasi persuasif, serta peningkatan disiplin pelaporan agar pelaksanaan pembinaan lebih konsisten, adaptif, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan perlunya penguatan pembinaan Bhabinkamtibmas melalui pembentukan Bhabinkamtibmas Academy di tingkat Polres Natuna sebagai pusat pelatihan mini yang berfokus pada peningkatan kompetensi komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital dengan melibatkan narasumber eksternal. Selain itu, pengembangan sistem pengelolaan anggaran partisipatif melalui program kemitraan keamanan komunitas perlu dilakukan untuk memperluas dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial dalam kegiatan pembinaan masyarakat.

Di sisi lain, penguatan sarana prasarana direkomendasikan melalui implementasi Mobile Command Post Bhabinkamtibmas berupa pos bergerak berbasis kendaraan multifungsi yang dilengkapi perangkat komunikasi dan akses internet. Pembaruan metode pembinaan juga perlu dilakukan melalui penerapan Integrated Digital Policing System yang mengintegrasikan kegiatan sambang, laporan masyarakat, dan tindak lanjut pembinaan dalam satu platform digital sehingga memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time serta mendukung sistem reward and punishment berbasis kinerja.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih setulusnya penulis sampaikan kepada Kapolres Natuna AKBP Novyan Aries Efendi, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penulisan ini hingga selesai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adma Gumilang, M., Wibisono, C. . ., & Wayan Catrayasa, I. (2024). Determinasi Pengetahuan, Kompetensi, Dan Pelatihan Terhadap Konsistensi Kader Posyandu Dengan Efektivitas Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Posyandu Kabupaten Bintan. *Bahtera Inovasi*, 8(2), 156-162. <https://doi.org/10.31629/2s489t63>
- Edison, E., & Komariyah, I. (2023). *Implementasi strategis dan kepemimpinan*. JPPI, 9(1), 499–505. <https://doi.org/10.29210/020231984>
- Ekici, N., Akdogan, H., Kelly, R., & Gultekin, S. (2022). *A meta-analysis of the impact of community policing on crime reduction*. Journal of Community Safety & Well-Being, 7(3), 111–121. <https://doi.org/10.35502/jcswb.244>
- Hamdani sitohang, R., Langgeng Ratnasasi, S. ., & Pintor Siolemba Patiro, S. . (2025). Determinan Kinerja Personil Kepolisian di Polresta Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Bahtera Inovasi*, 9(1), 1-9. <https://doi.org/10.31629/bi.v9i1.7359>
- Laporan Kesatuan (Lapsat) Satbinmas Polres Natuna. (2024). *Dokumen Lapsat Satbinmas Polres Natuna*.
- Nardo, R., Prayoga, W. ., Mulyana, H. ., & Yuniarsih, T. . (2025). Peran Perencanaan SDM dan Pengarahan Dalam MSDM Strategik: Dampaknya Terhadap Produktivitas Karyawan Dengan Keterlibatan Karyawan Sebagai Mediasi. *Bahtera Inovasi*, 9(1), 54-68. <https://doi.org/10.31629/bi.v9i1.7394>
- Riyanto, S. (2018). *Strategic management: Analisis faktor internal dan eksternal (IFAS–EFAS–SFAS)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sumiati, R., Haryono, D., & Zulwisman. (2025). *Efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021*. Jurnal Dimensi Hukum, 9(3), 113–130. Universitas Riau.
- Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). *The new era of mixed methods*. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 3–7. <https://doi.org/10.1177/2345678906293042>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.